

**PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM  
PERSPEKTIF SYARIAH *ENTERPRISE THEORY*  
(Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah,  
dan BPRS Bhakti Sumekar)**

**Ratna Kusumadewi<sup>1\*</sup>, Rifqi Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia

<sup>2</sup> Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding Author: Ratnakusumadewi024@iainsasbabel.ac.id

**ABSTRACT**

**Purpose** - The purpose of this study is to provide knowledge and information about the level of disclosure of social responsibility in Islamic banks in the perspective of sharia enterprise theory (SET) in 2017.

**Research Method** - This study is a quantitative study using data on social responsibility reports for the period of 2017 with a sample of 3 Islamic banks in Indonesia, namely BSM, BTN Syariah, and BPRS Bhakti Sumekar. The analytical method used is the content analysis method (Content Analysis).

**Findings** - The findings show that BSM has the highest level of social responsibility disclosure with a score of 31 points (74%) followed by BTN Syariah with a score of 26 points (62%), while BPRS Bakti Sumekar gets a score of 19 points (45%).

**Implication** - The implications of this research can provide input for regulations to further encourage banks to carry out CSR activities as a form of awareness and corporate social responsibility to the community.

Keywords: Social Responsibility, Sharia Enterprise Theory (SET), Islamic Bank

JEL code: M40; M14

**PENDAHULUAN**

Saat ini tanggung jawab sosial semakin populer dikenal di Indonesia, hal ini terlihat dari meningkatnya praktek tanggung jawab sosial dan banyaknya diskusi-diskusi tentang tanggung jawab sosial dalam ruang lingkup global maupun nasional. (Hardiansyah dalam Mansur, 2012). Tanggungjawab sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat tanpa terkecuali perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan khususnya perbankan.

Perusahaan khususnya perbankan memiliki alasan dalam melaporkan kegiatan sosialnya, alasan tersebut dilandasi karena paradigma tanggungjawab mengalami perubahan yang awalnya dari manajemen kepada pemilik saham menjadi manajemen kepada stakeholder. (Mulyanita, 2009 dalam (Mansur 2012). Sebagai perbankan yang berbasis syariah, bank syariah juga memiliki peran dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Meutia dalam Novarela dan Mulia Sari (2015) mengatakan bahwa perbankan syariah harus memiliki sisi spiritual yang lebih luas. Perbankan syariah bukan hanya menghendaki praktek bisnis halal saja, melainkan mampu memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat khususnya masyarakat golongan ekonomi ke bawah.

Oleh karena itu perbankan syariah, perlu mempunyai sebuah standart penilaian penerapan tanggung jawab sosial yang relevan dengan visi bank syariah yang memprioritaskan kemaslahatan bagi setiap orang. Standart yang dianggap sesuai untuk mengukur tingkat penerapan tanggungjawab sosial tersebut yaitu menggunakan perspektif *Syariah Enterprise Theory* karena teori ini memandang Allah sebagai pemilik mutlak segala sumber daya yang ada di alam semesta ini. Sehingga dalam memanfaatkan sumber daya tersebut diperlukan tanggungjawab sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Allah. (Triyuwono 2012).

Penelitian tentang *syariah enterprise theory* masih terbatas. Salah satunya penelitian yang dilakukan Novarela dan Mulia Sari (2015) tentang pengungkapan CSR pada perbankan syariah menunjukkan hasil Bank Muamalat Indonesia memperoleh tingkat tertinggi pengungkapan CSR dari sepuluh Bank Umum Syariah yang diteliti. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada *annual report* BSM, BTN Syariah, dan BPRS Bhakti Sumekar. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* khususnya BSM, BTN syariah dan BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan perspektif *syariah enterprise theory*.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Tanggungjawab Sosial**

Setiap perusahaan mempunyai keharusan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya, apabila perusahaan tersebut menjalankan tanggungjawab sosialnya maka akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan profitabilitas perusahaan (Mursitama 2011):

Secara universal tanggungjawab sosial diartikan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya mewujudkan sebuah keseimbangan antara tujuan, sosial, ekonomi, dan lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan harapan para *shareholders* dan *stakeholders* (Ningsih dan Akbar, 2011). Terkait pelaporan tanggungjawab sosial setiap perusahaan memiliki alasan tersendiri mengenai pelaporan CSR tersebut. Ada dua teori yang mendasari alasan tersebut yaitu *stakeholder theory* dan *legitimasi theory* (Sembiring 2003 dalam Putri, 2017)

#### **1. Stakeholder Theory**

Menurut teori stakeholder, tanggungjawab sosial bertujuan untuk membantu para manajer bank dalam meningkatkan value perusahaan dan meminimalisir kerugian-kerugian bagi pemangku kepentingan (stakeholder).

#### **2. Legitimisasi Theory**

Menurut pandangan teori legitimasi, jika komunitas mengharapkan adanya pelaporan tentang aktivitas perusahaan maka manajemen perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya. Teori ini menjelaskan bahwa komponen utama yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan yaitu persepsi dan pengakuan publik.

### **Syariah Enterprise Theory (SET)**

Menurut Triyuwono (2001), dasar yang menjadi landasan *Syariah Enterprise Theory* yaitu “metafora zakat”. Metafora zakat tersebut pada dasarnya memuat keseimbangan nilai karakter kemanusiaan yang terdiri dari perpaduan karakter egoistik dan karakter sosial. Karakter egoistik dimaknai agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan selama masih memperhatikan aspek syariahnya seperti mengalokasikan sebagian profit untuk zakat. Sedangkan karakter sosial dimaknai bahwa setiap perusahaan juga memiliki perhatian yang besar terhadap kemakmuran manusia dan lingkungan sekitar yang tergambar dari zakat itu sendiri.

Konsekuensi perpaduan antara karakter egoistik dan karakter sosial mengakibatkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) memiliki perhatian pada pemangku kepentingan yang luas mencakup Allah, manusia dan alam. *Syariah Enterprise Theory* menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya terletak satu pihak saja tetapi banyak pihak (pemangku kepentingan), tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk pihak lain. (Mulawarman et al. 2011)

Menurut Triyuwono (2007), dalam konsep *Syariah Enterprise Theory*, pemangku kepentingan mencakup Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pemangku kepentingan yang pertama karena memiliki kedudukan yang paling tinggi dan mutlak, sedangkan manusia merupakan pemangku kepentingan kedua. Manusia dikelompokkan menjadi dua antara lain *direct-stakeholder* yaitu pihak yang memberikan kontribusi finansial maupun non finansial langsung kepada perusahaan dan *indirect-stakeholder* yaitu pihak yang berhak atas dukungan sosial dari perusahaan walaupun mereka tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan terakhir yaitu alam. Alam memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan sama seperti Allah dan manusia.

### **Item Pengungkapan Tanggungjawab Sosial**

*Syariah enterprise theory* menawarkan dua dimensi dalam pengungkapan tanggungjawab sosial bagi bank syariah yaitu dimensi akuntabilitas vertikal dan dimensi akuntabilitas horizontal (Meutia 2009 dalam Novarela dan Mulia Sari, 2015). Akuntabilitas vertikal diarahkan ke Allah, dimensi ini terdiri dari dua komponen antara lain laporan opini DPS dan fatwa yang dipatuhi atau tidak dengan alasan dan laporan opini tentang masalah operasional.

Akuntabilitas horizontal diarahkan ke tiga pihak, pertama pihak pemangku kepentingan langsung mencakup karyawan dan nasabah, kedua pihak pemangku kepentingan tidak langsung yaitu masyarakat, ketiga alam. Dimensi akuntabilitas horizontal kepada nasabah terdiri dari lima komponen antara lain kemampuan dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan zakat dan qardhul hasan, informasi kesyariahan komoditas/produk, informasi pendanaan/pembiayaan, dan deskripsi kebijakan pengurangan transaksi non-syariah di masa yang akan datang. Terdapat empat komponen dimensi akuntabilitas kepada karyawan antara lain kebijakan upah dan kompensasi, kebijakan pelatihan karyawan, pelayanan kesehatan karyawan, dan fasilitas lain yang tersedia bagi karyawan.

Dimensi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat terdapat empat komponen antara lain inisiatif kebijakan untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat luas, kebijakan pembiayaan untuk menganalisis diskriminasi dan Hak Asasi Manusia, kebijakan pembiayaan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan peran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan dimensi akuntabilitas horizontal kepada alam meliputi enam komponen antara lain pelaporan kebijakan pembiayaan melalui analisis masalah lingkungan, menampilkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dapat merusak lingkungan, dan menjelaskan alasan pembiayaan, upaya meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data tanggungjawab sosial yang diungkapkan dalam laporan tahunan 2017 dan diambil secara online pada website bank BSM, BTN Syariah, dan BPRS Bhakti Sumekar dengan cara mengunduh laporan sesuai kebutuhan data. Metode analisis untuk penelitian ini terdiri dari empat prosedur/langkah yaitu sebagai berikut:

**Langkah Ke-1: Menentukan Komponen Pengungkapan Syariah Enterprise Theory (SET)**

Komponen pengungkapan SET dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Meutia (2009) dalam Novarela dan Mulia Sari (2015) yang dikembangkan dari dua dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas vertikal atau Allah SWT, kedua akuntabilitas horizontal dengan tiga pihak, pertama yaitu pemangku kepentingan langsung mencakup karyawan dan nasabah, kedua pihak pemangku kepentingan tidak langsung yaitu masyarakat, ketiga alam, namun ada inovasi – inovasi baru yang dimasukkan oleh peneliti dalam penilaian rincian tabel SET.

Rincian komponen – komponen tanggungjawab sosial dalam *Syariah Enterprise Theory*

**Tabel 1.** Rincian SET

No	KOMPONEN PELAPORANSET		SKOR					
			Keterangan					
1	<b>Akuntabilitas Vertikal (ALLAHSWT)</b>							
	A	Laporan opini DPS	Tidak Ada	0	Opini Bersifat Normatif	1	Ada Rekomendasi	2
	B	Fatwa yang dipatuhi atau tidak dengan alasan dan laporan opini tentang masalah operasional.	Tidak Ada	0	Fatwa tidak dicantumkan	1	Fatwa dicantumkan/Lengkap	2
2	<b>Akuntabilitas horizontal (Nasabah)</b>							
	A	Kemampuan dan Kompetensi anggota dewan pengawas syariah (DPS)	Tidak Ada	0	Tidak Lengkap	1	Lengkap/Detail	2
	B	Laporan zakat dan qardhul hasan	Tidak Ada	0	Ada Angka dan Deskripsi	1	Ada angka, gambar, deskripsi	2
	C	Informasi kesyariahan komoditas/produk,	Tidak Ada	0	Informasi bersifat umum	1	Informasi bersifat spesifik	2
	D	Jumlah pembiayaan	Tidak Ada	0	Ada Angka dan Deskripsi	1	Ada angka, gambar, deskripsi	2
	E	Deskripsi kebijakan pengurangan transaksi non-syariah di masa yang akan datang	Tidak Ada	0	Ada kebijakan	1	Ada Kebijakan dan Implementasi	2
3	<b>Akuntabilitas horizontal (Karyawan)</b>							
	A	Kebijakan upah dan kompensasi	Tidak Ada	0	Ada Angka dan Deskripsi	1	Ada angka, gambar, deskripsi	2
	B	Kebijakan pelatihan karyawan guna meningkatkan kualitas karyawan	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan, dan Deskripsi	1	Ada Kebijakan, Angka, Deskripsi	2
	C	Pelayanan kesehatan karyawan	Tidak Ada	0	Ada fasilitas, dan Deskripsi	1	Ada fasilitas, Angka, Deskripsi	2
	D	Fasilitas lain yang tersediabagi karyawan.	Tidak Ada	0	Ada fasilitas, dan Deskripsi	1	Ada fasilitas, Angka, Deskripsi	2
4	<b>Akuntabilitas horizontal (Masyarakat)</b>							

No	KOMPONEN PELAPORANSET	SKOR					
		Keterangan					
A	Inisiatif kebijakan untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat luas	Tidak Ada	0	Ada fasilitas dan Deskripsi	1	Ada fasilitas, angka, deskripsi	2
B	Kebijakan pembiayaan untuk menganalisis diskriminasi dan Hak Asasi Manusia	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan, dan Deskripsi	1	Ada Kebijakan, Angka, Deskripsi	2
C	Kebijakan pembiayaan untuk kepentingan seluruh masyarakat	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan, dan Deskripsi	1	Ada Kebijakan, Angka, Deskripsi	2
D	Peran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan	Tidak Ada	0	Ada fasilitas, Deskripsi, dan Angka	1	Ada Fasilitas, Deskripsi, angkadan Foto	2
<b>5</b>	<b>Akuntabilitas horizontal (Alam)</b>						
A	Pelaporan kebijakan pembiayaan melalui analisis masalah lingkungan	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan, dan Deskripsi	1	Ada Kebijakan, Angka, Deskripsi	2
B	Menampilkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dapat merusak lingkungan dan menjelaskan alasan pembiayaan	Tidak Ada	0	Ada Angka dan Deskripsi	1	Ada angka, gambar, deskripsi	2
C	Upaya meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan.	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan dan deskripsi	1	Ada Kebijakan, deskripsi, foto	2
D	Kontribusi terhadap lingkungan (penanaman pohon)	Tidak Ada	0	Ada program, deskripsi	1	Ada program, deskripsi, foto	2
E	Kebijakan internal bank untuk mendukung program hematenergy dan konservasi	Tidak Ada	0	Ada Kebijakan	1	Ada Kebijakan dan Implementasi	2
F	Peran organisasi dalam memberikan manfaat lingkungan	Tidak Ada	0	Ada Kontribusi dan deskripsi	1	Ada kontribusi, deskripsi dan foto	2

Sumber: Inovasi Peneliti Merujuk Penelitian Meutia dalam Novarela dan Mulia Sari (2015)

### Langkah ke-2: Melakukan Skoring

Langkah kedua yang dilakukan setelah menentukan komponen SET yaitu melakukan skoring setiap komponen pengungkapan SET pada Bank Mandiri Syariah, BTN syariah dan BPRS Bahkti Sumekar yang diungkapkan pada *annual report* masing-masing bank syariah. Jika setiap komponen yang diungkapkan secara lengkap atau detail informasinya maka akan memperoleh skor “2”, Jika komponen yang diungkapkan tidak lengkap informasinya maka akan memperoleh skor “1”, dan jika tidak ada maka akan memperoleh skor “0”. Jika Jika seluruh item diungkapkan secara lengkap/ detail akan memperoleh skor “42”.

### Langkah ke-3: Melakukan Analisis dan Penilaian

Langkah ketiga yang dilakukan yaitu menganalisis komponen - komponen SET pada setiap bank syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial masing-masing bank syariah. Kemudian melakukan penilaian kumulatif dari SET Bank Syariah, yang menentukan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial untuk masing-masing bank syariah. Rumus yang digunakan untuk menghitung SET kumulatif adalah sebagai berikut:

$$SET = \frac{\text{jumlah point yang diungkapkan}}{\text{Jumlah skor maksimal}}$$

### Langka ke-4: Memberikan Penilaian Tanggungjawab Sosial masing-masing Bank Syariah

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu memberikan penilaian CSR masing-masing bank syariah. Untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah, penulis mengklasifikasikannya menjadi empat kategori: Sangat Informatif (81-100), cukup Informatif (66-<51) dengan merujuk pada kriteria yang digunakan (Gustani, 2019)

**Tabel 2.** Penilaian Tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial bank Syariah

Penilaian	Nilai Indikator (%)
Sangat Informatif	81 s/d 100
Informatif	66 s/d <81
Kurang Informatif	51 s/d <66
Tidak Informatif	0 s/d <51

Sumber: (Gustani, 2019)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah Berdasarkan Indikator Syariah Enterprise Theory

Perhitungan tingkat pengungkapan CSR bank syariah dalam penelitian ini dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi akuntabilitas vertikal atau Allah SWT dan dimensi akuntabilitas horizontal mencakup nasabah, karyawan, masyarakat, alam. Berdasarkan hasil perhitungan skor indikator SET pada Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah, dan BPRS Bhakti Sumekar tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Skor Indikator SET**

No	Sub Item Pengungkapan	Persentase Skor SET			
		BSM	BTN Syariah	BPRS Bakti Sumekar	Total Rata-Rata
1	Allah SWT	75%	50%	75%	66,67%
2	Nasabah	100%	70%	70%	80,00%
3	Karyawan	87,50%	75%	75%	79,17%
4	Komunitas	75%	50%	37,50%	54,17%
5	Alam	43%	58,30%	0%	33,77%

Sumber: Data Sekunder Diolah

### **Dimensi Akuntabilitas Vertikal Kepada Allah SWT**

Penilaian dimensi akuntabilitas kepada Allah terdiri dari dua komponen penilaian yaitu opini DPS dan Fatwa yang dipatuhi atau tidak dengan alasan dan laporan opini tentang masalah operasional. Berdasarkan tabel 3 diatas skor indikator dimensi akuntabilitas vertikal (Allah SWT) yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dan BPRS Bakti Sumekar sama yaitu sebesar 75% (informatif). Kedua bank tersebut sudah mengungkapkan 2 (dua) item penilaian yaitu opini DPS dan laporan pernyataan tentang fatwa dan aspek operasional bank syariah, namun dalam laporan tersebut hanya mengungkapkan bahwa operasional perbankan syariah sudah sesuai dengan kepatuhan syariah tanpa mencantumkan fatwanya. Sedangkan BTN syariah memperoleh skor sebesar 50% (Kurang informatif). BTN Syariah hanya mengungkapkan aspek opini DPS saja tanpa ada pengungkapan laporan kepatuhan syariah terhadap fatwa dalam aspek operasional perbankan syariah.

### **Dimensi Akuntabilitas Horizontal Kepada Nasabah**

Penilaian dimensi horizontal kepada nasabah terdiri dari lima komponen penilaian yaitu kemampuan dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan zakat dan qardhul hasan, informasi kesyariahan komoditas/produk, informasi pendanaan/pembiayaan, dan deskripsi kebijakan pengurangan transaksi non-syariah di masa yang akan datang. Dari hasil perhitungan yang tertera pada tabel 3 diatas, Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh skor maksimal sebesar 100% (sangat informatif). Hal ini menunjukkan BSM sangat informatif dalam mengungkapkan pelaporan pertanggungjawaban kepada nasabah. Nilai tertinggi kedua dicapai oleh dua bank yaitu BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar dengan memperoleh skor 70% (informatif). BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar hanya mengungkapkan empat komponen saja, sedangkan komponen deskripsi kebijakan pengurangan transaksi non-syariah di masa yang akan datang tidak diungkapkan dalam laporan.

### **Dimensi Akuntabilitas Horizontal Kepada Karyawan**

Penilaian dimensi horizontal kepada karyawan terdiri dari empat komponen penilaian antara lain kebijakan upah dan kompensasi, kebijakan pelatihan karyawan, pelayanan kesehatan karyawan, dan fasilitas lain yang tersedia bagi karyawan. Berdasarkan tabel 3 diatas skor indikator dimensi akuntabilitas horizontal kepada karyawan yang diperoleh BSM sebesar 87,50% (Sangat Informatif). BSM sudah mengungkapkan keseluruhan komponen namun belum maksimal diungkapkan karena pada item fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan, BSM hanya mengungkapkan laporan dalam bentuk deskripsi saja tanpa ada pengungkapan jumlah fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Sedangkan BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor yang sama yaitu sebesar 75% (Informatif). Kedua bank tersebut sudah mengungkapkan empat komponen tetapi belum mendapatkan skor yang maksimal terutama pada komponen pelayanan kesehatan karyawan, dan fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan hanya mendapatkan skor 1 (satu) untuk masing – masing komponen tersebut. Kedua

komponen tersebut hanya diungkapkan dalam bentuk deskripsi saja namun tidak mencantumkan jumlah dana untuk masing – masing fasilitas yang diberikan kepada karyawannya seperti dana kesehatan maupun dana beasiswa untuk karyawan.

### **Dimensi Akuntabilitas Horizontal Kepada Masyarakat**

Penilaian dimensi akuntabilitas horizontal kepada Masyarakat terdiri dari empat komponen penilaian, yaitu inisiatif kebijakan untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat luas, kebijakan pembiayaan untuk menganalisis diskriminasi dan Hak Asasi Manusia, kebijakan pembiayaan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan peran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel 3 diatas, BSM memperoleh skor sebesar 75% (informatif), BTN Syariah 50% (kurang informatif) dan BPRS Bakti Sumekar 37,50% (Tidak Informatif). Komponen tentang kebijakan pembiayaan untuk menganalisis diskriminasi dan Hak Asasi Manusia tidak diungkapkan oleh ketiga bank syariah. Sedangkan komponen inisiatif kebijakan untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat luas hanya diungkapkan oleh BSM saja, BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar tidak mengungkapkan komponen tersebut.

### **Dimensi Akuntabilitas Horizontal Kepada Alam**

Penilaian dimensi akuntabilitas horizontal kepada alam terdiri dari enam komponen penilaian yaitu pelaporan kebijakan pembiayaan melalui analisis masalah lingkungan, menampilkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dapat merusak lingkungan, dan menjelaskan alasan pembiayaan, upaya meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan, Kontribusi terhadap lingkungan (penanamanpohon), Kebijakan internal bank untuk mendukung program hemat energy dan konservasi, Peran organisasi dalam memberikan manfaat lingkungan. Dari hasil perhitungan skor tertinggi diperoleh oleh BTN Syariah yaitu sebesar 58,30% (kurang informatif). Selanjutnya skor tertinggi kedua yaitu BSM sebesar 43% (tidak informatif). Sedangkan BPRS Bakti Sumekar sama sekali tidak mengungkapkan semua komponen terhadap akuntabiitas kepada alam. Dari ke enam komponen terdapat dua komponen yang tidak sama sekali diungkapkan oleh ketiga bank syariah tersebut yaitu komponen menampilkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dapat merusak lingkungan, dan menjelaskan alasan pembiayaan dan komponen Peran organisasi dalam memberikan manfaat lingkungan. Komponen Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi hanya diungkapkan oleh BTN Syariah saja sedangkan untuk komponen yang lain hanya diungkapkan oleh BSM dan BTN Syariah saja yaitu komponen pelaporan kebijakan pembiayaan melalui analisis masalah lingkungan, upaya meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan, Kontribusi terhadap lingkungan (penanaman pohon).

### **Tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Kumulatif Bank Syariah Berdasarkan IndikatorSET**

Perhitungan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial kumulatif Bank Syariah berdasarkan indikator SET dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikannya menjadi empat kategori yaitu Sangat Informatif (81-100), cukup Informatif (66-<51) dengan merujuk pada kriteria (Gustani, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan skor SET pada Bank Syariah pada tahun 2017 diperoleh skor dan point SET pada masing-masing Bank Syariah sebagai berikut:



**Tabel 4.** Tingkat Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Kumulatif SET

No	Komponen Pengungkapan	Skor SET		
		BSM	BTN Syariah	BPRS Bakti Sumekar
1	Allah SWT	3	2	3
2	Nasabah	10	7	7
3	Karyawan	7	6	6
4	Komunitas	6	4	3
5	Alam	5	7	0
	Total Skor SET	31	26	19
	Persentase TotalSkor SET	74%	62%	45%

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan skor yang ditunjukkan Tabel 4 di atas, diketahui bahwa BSM merupakan Bank Syariah yang memiliki tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial tertinggi dengan memperoleh skor sebesar 31 point atau sebesar 74%, kemudian yang kedua diperoleh oleh BTN Syariah yaitu dengan skor 26 point atau sebesar 62%, sedangkan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor 19 point atau sebesar 45%. Sedangkan secara penilaian BSM memperoleh penilaian “informatif” karena memperoleh skor SET diantara 66 s/d <81, sedangkan BTN Syariah memperoleh penilaian “kurang informatif” karena memperoleh skor SET diantara 51 s/d <66. Sementara BPRS Bakti Sumekar mendapatkan penilaian “tidak informatif” karena memperoleh skor SET diantara 0 s/d <51. Berdasarkan analisis dan perhitungan SET diatas, maka disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial yang paling baik adalah BSM, disusul BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah dalam perspektif *syariah enterprise theory* (SET) pada tahun 2017. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa BSM merupakan bank yang memiliki tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial tertinggi. Temuan lainnya adalah tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial berdasarkan SET pada dimensi akuntabilitas vertikal kepada Allah, ketiga Bank Syariah tidak ada yang memperoleh skor maksimal. BSM dan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor yang sama yaitu sebesar 75% dengan predikat “informatif” sedangkan BTN Syariah memperoleh skor sebesar 50% dengan predikat “Kurang Informatif”.

Hasil temuan yang diperoleh dari hasil analisis tingkat pengungkapan CSR dari sisi dimensi akuntabilitas horizontal kepada nasabah, BSM memperoleh skor maksimal atau sangat informatif. Sedangkan BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor yang sama yaitu sebesar 70% dengan penilaian “informatif”. Sedangkan dari sisi dimensi akuntabilitas horizontal kepada karyawan, skor tertinggi diperoleh BSM dengan skor 87,50% dengan penilaian “sangat informatif”, sedangkan BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor yang sama lagi seperti pada item akuntabilitas horionta-nasabah dengan memperoleh skor 75% dengan penilaian “Informatif”. Selanjutnya dari sisi dimensi akuntabilitas horizontal kepada komunitas memiliki variasi yang berbeda- beda. BSM mendapatkan skor 75% dengan penilaian “informatif”, BTN syariah memperoleh skor 50% dengan penilaian “kurang informatif”, sedangkan BPRS Bakti Sumekar memperoleh skor terendah yaitu sebesar 37,50% dengan penilaian “tidak informatif”. Temuan yang terakhir yaitu dari sisi dimensi akuntabilitas horizontal kepada alam, ketiga Bank Syariah mendapatkan skor terendah semua dengan memperoleh satu penilaian ‘kurang informatif’ dan dua penilaian “tidak informatif”. Penilaian “kurang informatif” diperoleh BSM sedangkan

BTN Syariah dan BPRS Bakti Sumekar memperoleh penilaian yang sama yaitu penilaian “tidak informatif”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Tahunan 2017 Bank Syariah Mandiri, Diakses 04 Desember 2018 dari Situs Resmi Bank SyariahMandiri: [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)
- Laporan Tahunan 2017 BTN Syariah, Diakses 04 Desember 2018 dari Situs Resmi BTN Syariah: [www.btnsyariah.co.id](http://www.btnsyariah.co.id)
- Laporan Tahunan 2017 BPRS Bhakti Sumekar, Diakses 04 Desember 2018 dari Situs Resmi BPRS BhaktiSumekar: [www.bhaktisumekar.co.id](http://www.bhaktisumekar.co.id).
- Gustani, G. (2019). Model Pelaporan Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Implementasi Islamic Social Reporting Index di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.51>
- Mansur, Syuhada. 2012. “Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri).” *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2 (2): 107–33.
- Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto, and Unti Ludigdo. 2011. “Menuju Teori AkuntansiSyariah Baru.” *Ekonomi & Keuangan Islam* 1 (1): 61–78.
- Mursitama, Tirta N. 2011. *Corporate Social Responsibility Di Indonesia (Teori Dan Implementasi)*. Jakarta:Institute for Economic Development and Finance (INDEF).
- Ningsih, Septi, and Dinnul Alfian Akbar. 2011. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan KinerjaPerusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index,” 1–9.
- Novarela, Dori, and Indah Mulia Sari. 2015. “Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan SyariahDalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2 (2): 145–59.
- Putri, Mega Mayang Puspitasari. 2017. “Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Dalam SudutPandang Syariah Enterprise Theory Periode Tahn 2014 Studi Pada Bank Muamalat Dan Bank BNI Syariah.” *Ekonomi Akuntansi* 3: 646–61.
- Triyuwono, Iwan. 2001. “Metafora Zakat Dan Shari’ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar DalamMembentuk Akuntansi Syari’ah.” *JAAI* 5 (2): 131–45.
- . 2007. “Sing Liyan ‘Formulasi Untuk Nilai Tambah Syariah.’” *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–21.
- . 2012. *Akuntansi Syariah Persfektif, Metodologi, Dan Teori Edisi 2-3*. Jakarta: Rajawali Pers.